

Modal Sosial Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Pesisir Selatan

Nova Arzila¹, Suryanef², Al Rafni³, Susi Fitria Dewi⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas modal sosial anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2024 di Pesisir Selatan. Tujuannya untuk mendeskripsikan bentuk modal sosial yang dimiliki anggota legislatif PKB di daerah tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Informan terdiri dari enam anggota legislatif PKB terpilih, Ketua DPC PKB, dan pihak KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota legislatif PKB memanfaatkan tiga bentuk modal sosial: bonding social capital, bridging social capital, dan linking social capital. Bonding social capital dominan, tercermin dari kedekatan emosional dengan masyarakat, dukungan keluarga, dan keterlibatan tokoh agama. Bridging social capital terlihat dari partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan kegiatan lintas kelompok, sedangkan linking social capital muncul melalui hubungan dengan struktur kekuasaan lokal dan jaringan partai. Pemanfaatan ketiga

bentuk modal sosial ini berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan PKB meraih enam kursi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan perolehan suara 12,62%.

Kata Kunci: Modal Sosial, PKB, Pemilu Legislatif, Bonding, Bridging, Linking

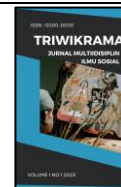
ABSTRACT

This study examines the social capital of the legislative members of the National Awakening Party (PKB) in winning the 2024 Legislative Election in Pesisir Selatan. The study aims to describe the forms of social capital possessed by PKB legislative members in the region. It employs a qualitative descriptive method, with data collected through structured interviews and documentation. The informants include six elected PKB legislators, the Chairperson of the PKB Branch Leadership Council (DPC), and representatives from the Pesisir Selatan General Election Commission (KPU). Data analysis follows the interactive model of Miles and Huberman, encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with source triangulation to ensure data validity. The findings indicate that PKB legislators utilize three forms of social capital: bonding social capital, bridging social capital, and linking social capital. Bonding social capital is dominant, reflected in emotional closeness with the community, family support, and engagement with religious leaders. Bridging social capital appears through participation in community organizations and cross-group activities, while linking social capital is manifested in relationships with local power structures and party networks. The effective utilization of these three forms of social capital significantly contributed to PKB's success in securing six seats in the Pesisir Selatan Regional House of Representatives, with a vote share of 12.62%.

Keywords: Social Capital, PKB, Legislative Election, Bonding, Bridging, Linking

*Corresponding author

E-mail addresses: suryanef@fis.unp.ac.id



PENDAHULUAN

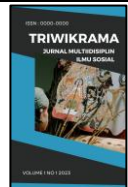
Pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu kontestasi politik yang penuh persaingan dan dinamis. Berbagai partai politik berupaya keras untuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam kompetisi yang ketat tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) muncul sebagai pemenang dengan perolehan enam kursi DPRD dan dukungan suara sebesar 12,62%. Capaian ini menempatkan PKB sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi di Pesisir Selatan, sekaligus menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam peta politik daerah dibandingkan Pemilu 2019, di mana PKB belum menjadi pilihan dominan masyarakat. Pergeseran ini memperlihatkan adanya perubahan preferensi politik warga, yang tidak lepas dari strategi kedekatan sosial dan keterlibatan aktif para calon legislatifnya.

Keberhasilan PKB tidak hanya dipengaruhi oleh kampanye yang dilakukan menjelang pemilu, tetapi juga oleh kekuatan hubungan sosial yang telah lama dibangun antara calon legislatif (caleg) PKB dan masyarakat. Hubungan ini terbentuk melalui interaksi rutin, keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan, serta pemeliharaan kepercayaan dari waktu ke waktu. Banyak caleg PKB yang terpilih memiliki latar belakang sebagai tokoh masyarakat atau pejabat di tingkat nagari, seperti wali nagari, yang membuat mereka dikenal luas oleh warga. Posisi ini memberi keuntungan berupa akses langsung kepada masyarakat, pemahaman mendalam atas kebutuhan warga, serta jaringan dukungan yang kuat. Dengan demikian, ketika mereka maju sebagai caleg, sudah ada basis sosial yang siap memberikan dukungan politik.

Modal sosial yang dimanfaatkan caleg PKB dapat dilihat dalam tiga bentuk utama. Pertama, *bonding social capital*, yaitu hubungan erat dengan keluarga, kerabat, dan komunitas lokal yang dibangun secara emosional. Kedekatan ini sering kali diwujudkan dalam bentuk dukungan keluarga besar, keterlibatan dalam acara adat, dan bantuan sosial bagi warga sekitar. Kedua, *bridging social capital*, yakni kemampuan menjalin hubungan dengan kelompok sosial lain di luar lingkaran terdekat, misalnya melalui keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan, kegiatan lintas komunitas, dan jejaring antarwilayah yang memperluas basis dukungan. Ketiga, *linking social capital*, yaitu hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, seperti jaringan partai politik di tingkat daerah, tokoh agama, serta hubungan baik dengan pemerintah daerah yang dapat memberikan legitimasi politik.

Bentuk modal sosial ini terlihat jelas pada contoh caleg seperti Erwil, S.I.P., yang memperoleh 2.383 suara di daerah pemilihan dua. Kemenangannya bukan semata hasil kampanye singkat, melainkan buah dari kedekatan sosial yang terbangun bertahun-tahun sebelumnya, ditambah pengalamannya sebagai wali nagari. Hal serupa juga terlihat pada caleg lain seperti Gusmen, S.Sos, Jetrizanko, S.Pd., M.M., Mulyadi, A.Md., Roni Ade Putra, dan Darmansyah, yang masing-masing memanfaatkan pengalaman, reputasi, dan jaringan sosial mereka untuk membangun kepercayaan masyarakat. Meski latar belakang mereka berbeda—mulai dari mantan kepala desa, aktivis masyarakat, hingga pengusaha—mereka memiliki kesamaan dalam menjaga komunikasi dan keterhubungan sosial secara konsisten.

Secara teoritis, modal sosial merupakan aset penting dalam dunia politik. Fukuyama dalam (Suryawan, 2017) menjelaskan bahwa modal sosial adalah hubungan antarindividu yang dibangun



atas nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan kesetiaan. Sementara Bourdieu (Krisdinanto, 2014) mendefinisikannya sebagai sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok melalui jaringan, norma, dan kepercayaan timbal balik yang dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks politik lokal, modal sosial memungkinkan caleg memperluas dukungan, memperkuat legitimasi, dan memengaruhi perilaku pemilih. Temuan di Pesisir Selatan membuktikan bahwa pengelolaan modal sosial yang tepat tidak hanya meningkatkan peluang keterpilihan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang antara wakil rakyat dan konstituennya.

Dengan demikian, kemenangan PKB pada Pemilu 2024 menjadi bukti konkret bagaimana modal sosial dapat menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan politik. Fenomena kemenangan PKB di Pesisir Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan politik tidak hanya ditentukan oleh strategi kampanye, melainkan juga oleh pengelolaan modal sosial yang telah dibangun jauh sebelum masa pemilihan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bentuk modal sosial yang dimiliki anggota legislatif PKB di Pesisir Selatan dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2024, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap modal sosial tersebut.

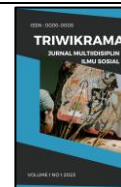
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Azis Nasser et al. (2021), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menafsirkan data di lapangan. Konsep penelitian deskriptif menurut Samsu (2021) merujuk pada pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, menggambarkan objek atau subjek yang diteliti, mempelajari masalah yang terdapat dalam masyarakat, termasuk hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara rinci bentuk modal sosial yang digunakan oleh anggota legislatif PKB dalam memenangkan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan, serta rancangan dan pelaksanaan program yang mereka lakukan setelah terpilih. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat DPC PKB Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Pahlawan Rawang, Painan Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai pusat koordinasi politik partai, dan di Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sumber data resmi hasil rekapitulasi suara.

Pemilihan kedua lokasi ini bertujuan untuk memudahkan peneliti memperoleh data valid dan relevan secara langsung dari informan yang tepat. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pengurus DPC PKB Pesisir Selatan, anggota legislatif PKB terpilih pada Pemilu 2024, dan pihak KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer, yakni hasil wawancara dan observasi langsung kepada informan, serta data sekunder berupa dokumen resmi, arsip, dan publikasi terkait pemilu legislatif 2024 di Pesisir Selatan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan studi dokumentasi dari berbagai sumber

*Corresponding author

E-mail addresses: suryanef@fis.unp.ac.id



pendukung. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa informan untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang untuk memperoleh hasil yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Modal Sosial Anggota Legislatif PKB

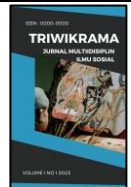
Berdasarkan hasil penelitian, enam anggota legislatif PKB yang terpilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan tiga bentuk modal sosial sebagaimana dikemukakan Woolcock, yaitu *bonding social capital*, *bridging social capital*, dan *linking social capital*. Ketiga bentuk ini muncul dengan porsi berbeda pada setiap informan, sesuai latar belakang, pengalaman, dan jejaring yang dimiliki. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fukuyama dan Bourdieu bahwa modal sosial adalah aset yang terbentuk melalui jaringan, norma, dan kepercayaan timbal balik, yang dapat dimobilisasi untuk tujuan politik.

1. Darmansyah (Dapil 5)

Darmansyah menunjukkan dominasi *linking social capital* dalam perannya. Pengalamannya sebagai Wali Nagari selama dua periode memberinya akses langsung terhadap tokoh politik daerah, pejabat pemerintahan, serta sumber daya formal. Dengan posisi tersebut, ia memiliki kemampuan untuk menghubungkan masyarakat di tingkat nagari dengan pihak-pihak berwenang di tingkat kabupaten, bahkan provinsi. *Bonding social capital* juga kuat, terlihat dari dukungan kekerabatan dan legitimasi adat. Ia mendapat dukungan dari tokoh-tokoh adat yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan sosial-politik di Pesisir Selatan. *Bridging social capital* terlihat dari partisipasinya dalam kegiatan lintas komunitas, termasuk organisasi masyarakat dan kegiatan sosial-keagamaan yang melibatkan kelompok di luar nagarinya.

2. Gusmen (Dapil 1)

Gusmen memiliki *bonding social capital* yang dominan. Kedekatan emosionalnya dengan warga, terutama masyarakat nagari dan tokoh lokal, dibangun melalui keterlibatannya dalam acara adat, kegiatan keagamaan, serta aktivitas sosial rutin. Ia dikenal masyarakat sebagai figur yang mudah dijangkau, tidak membatasi interaksi, dan kerap hadir secara langsung dalam momen-momen penting bagi warga. *Bridging social capital* terbangun melalui komunikasi dengan tokoh lintas komunitas, seperti pengusaha lokal, pemuda lintas nagari, dan kelompok perempuan. Sementara itu, *linking social capital* dimilikinya melalui hubungan dengan perangkat pemerintahan, meskipun porsinya tidak sebesar *bonding*. Temuan ini menguatkan pandangan Fukuyama dalam (Situmorang, 2017) bahwa *bonding* yang kuat membentuk loyalitas pemilih. Kedekatan emosional menjadi modal utama bagi Gusmen untuk memperoleh dukungan solid, karena pemilih cenderung memilih figur yang telah memberi manfaat nyata sebelum masa kampanye.



3. Mulyadi (Dapil 2)

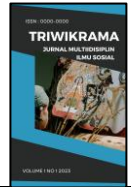
Berbeda dengan Gusmen, kekuatan utama Mulyadi terletak pada *bridging social capital*. Latar belakangnya sebagai pengusaha membuatnya memiliki jejaring luas yang mencakup lintas komunitas, profesi, dan wilayah. Melalui jejaring ini, Mulyadi mampu menjangkau kelompok yang beragam, mulai dari pelaku UMKM, komunitas nelayan, hingga jaringan pengusaha antar daerah. *Bonding social capital* dibangun melalui dukungan keluarga dan kerabat dekat, yang turut aktif menyebarkan informasi dan memperkenalkan dirinya ke masyarakat. Namun, *linking social capital* relatif lebih lemah karena minim pengalaman dalam struktur politik formal sebelum mencalonkan diri. Pola ini sesuai dengan konsep Woolcock dalam (Laura et al., 2018) yang menekankan peran *bridging* sebagai jembatan untuk memperluas basis dukungan di luar komunitas inti. Mulyadi memanfaatkan modal ini untuk memperkuat posisinya di mata kelompok yang sebelumnya tidak memiliki kedekatan personal dengannya.

4. Erwil (Dapil 3)

Erwil menonjol dengan *bonding social capital* yang terbentuk sejak ia aktif sebagai Ketua Pemuda hingga menjabat sebagai Wali Nagari. Kedekatan personal ini didukung oleh perannya dalam menginisiasi program-program desa yang bermanfaat langsung bagi warga. *Bridging social capital* ia kembangkan melalui kerja sama dengan kelompok tani, koperasi, dan pelaku UMKM di wilayahnya. Selain itu, *linking social capital* juga ada berkat hubungannya dengan pemerintah daerah dan jejaring partai, yang memudahkannya dalam mengakses program pembangunan untuk daerahnya. Kombinasi ini mencerminkan teori bahwa perpaduan antara *bonding*, *bridging*, dan *linking* dapat meningkatkan dukungan politik dan memperkuat citra sebagai pemimpin yang mampu bekerja di berbagai tingkatan.

5. Roni Ade Putra (Dapil 4)

Roni Ade Putra mengandalkan *bonding social capital* sebagai kekuatan utama. Hubungan personal yang erat dengan keluarga inti dan kerabat dekat menjadi basis dukungan yang kokoh. *Bonding* ini diperkuat dengan rutinitas komunikasi langsung bersama warga, terutama melalui pertemuan informal seperti acara keluarga, gotong royong, dan kegiatan keagamaan. *Bridging social capital* ia bangun lewat diskusi dengan warga lintas nagari, yang membuatnya lebih dikenal di luar komunitas inti. *Linking social capital* mulai terbentuk ketika ia aktif di kepengurusan DPC PKB, memberikan akses terhadap struktur partai dan jejaring politik formal. Temuan ini menunjukkan bahwa kedekatan personal berperan besar dalam membentuk rasa percaya dan keterikatan emosional, yang pada akhirnya menjadi dasar loyalitas politik. Hal ini sejalan dengan dikemukakan oleh Lyda Judson Hanifan (1916) dalam bukunya *The Rural School Community Centre* dalam (Munif, 2020) bahwa kemajuan kelompok sosial tidak dapat diperoleh hanya dengan uang, tetapi harus dibangun melalui kerja sama, rasa persahabatan, serta kemauan baik antar anggota komunitas.



6. Jetrizanko (Dapil 3)

Jetrizanko memiliki *bonding social capital* yang kuat, terbentuk dari pengalaman sebagai pendamping desa dan kemudian sebagai Wali Nagari. Kedekatan ini membuatnya dipercaya sebagai figur yang memahami kondisi riil masyarakat. *Bridging social capital* ia peroleh melalui kerja sama lintas daerah, seperti program pembangunan infrastruktur antar nagari. *Linking social capital* dimilikinya lewat koneksi dengan dinas-dinas pemerintah yang memfasilitasi berbagai program pembangunan. Sejalan dengan teori Bourdieu dalam (Krisdinanto, 2014), modal sosial yang ia miliki menjadi modal simbolik yang dapat dikonversi menjadi dukungan politik. Pengalaman di pemerintahan desa memberinya reputasi positif yang diakui masyarakat.

Secara keseluruhan, kombinasi ketiga bentuk modal sosial ini menjadi faktor kunci keberhasilan PKB meraih kemenangan di Pesisir Selatan. Tidak hanya memberikan keuntungan saat kampanye, tetapi juga membangun dukungan politik jangka panjang.

B. Pandangan Partai Politik dan Masyarakat terhadap Modal Sosial Anggota Legislatif PKB

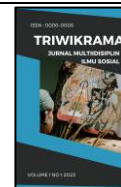
Hasil wawancara dengan pengurus DPC PKB Pesisir Selatan menunjukkan bahwa partai memiliki pandangan strategis terhadap peran modal sosial dalam pemenangan pemilu. PKB menekankan bahwa kemenangan pada Pemilu Legislatif 2024 tidak semata-mata bergantung pada kegiatan kampanye formal, melainkan sangat dipengaruhi oleh modal sosial yang telah dibangun jauh sebelum masa pencalonan. Bagi partai, modal sosial merupakan modal politik utama yang wajib dimiliki setiap calon legislatif. Calon dengan basis sosial yang kuat, jaringan keluarga besar, dukungan tokoh masyarakat, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial diprioritaskan. Hal ini untuk memastikan bahwa calon memiliki *trust* dan legitimasi di mata masyarakat, sehingga peluang keterpilihan menjadi lebih besar.

Pengurus partai menilai bahwa *bonding social capital* menjadi pondasi awal, karena di sinilah loyalitas dan dukungan inti terbentuk. *Bridging social capital* berfungsi memperluas jangkauan dukungan di luar basis tradisional, sementara *linking social capital* menjadi sarana untuk mendapatkan dukungan formal dari pihak-pihak berwenang, seperti pemerintah daerah atau organisasi besar. PKB juga menekankan bahwa modal sosial yang kuat mempermudah koordinasi internal partai, karena caleg yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi penghubung efektif antara struktur partai dan konstituen. Hubungan harmonis antara caleg, masyarakat, dan pengurus partai dianggap mampu memperkuat soliditas partai. Lebih jauh, PKB memandang modal sosial tidak hanya bermanfaat pada masa kampanye, tetapi juga setelah pemilu. Anggota legislatif diharapkan tetap menjaga interaksi dan keterlibatan sosial agar hubungan dengan konstituen tetap terpelihara, sehingga partai memiliki modal kuat untuk kontestasi politik berikutnya.

Dari sisi masyarakat, modal sosial anggota legislatif dinilai melalui tiga hal utama:

1. Kehadiran fisik di tengah warga

Kehadiran langsung dianggap sebagai tanda komitmen dan kepedulian. Banyak responden menyebutkan bahwa mereka lebih percaya pada calon legislatif yang hadir di acara adat, kegiatan keagamaan, gotong royong, atau memberikan bantuan saat bencana.



Bagi masyarakat Pesisir Selatan, kehadiran tersebut bukan hanya simbol, tetapi menunjukkan bahwa wakil rakyat memahami kondisi riil warganya.

2. Kedekatan emosional

Kedekatan emosional menjadi alasan penting mengapa masyarakat bersedia memberikan suara. Banyak warga mengaku memilih bukan karena program yang dijanjikan, tetapi karena hubungan personal yang sudah terjalin. Bahasa komunikasi yang sederhana, keramahan, dan sikap tidak menjaga jarak menjadi nilai tambah yang diapresiasi oleh pemilih. Hal ini sejalan dengan relevansi teori Fukuyama (1995) dalam buku *Trust The Social Virtues and The Creations of Prosperity* dalam (Situmorang, 2017) yang menyebutkan bahwa kepercayaan (trust) merupakan inti dari modal sosial, di mana rasa saling percaya memudahkan terciptanya kerjasama politik.

3. Konsistensi interaksi

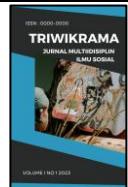
Pemilih menilai caleg bukan hanya dari aktivitas menjelang pemilu, tetapi dari konsistensi mereka dalam menjaga interaksi sejak jauh hari. Masyarakat lebih menghargai wakil rakyat yang tetap hadir dan berkomunikasi setelah menjabat, karena hal itu menunjukkan komitmen jangka panjang. Hubungan yang terjaga secara konsisten mampu meningkatkan kualitas demokrasi, karena kepercayaan politik tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui proses interaksi yang berulang.

Dengan demikian, baik partai politik maupun masyarakat memandang modal sosial sebagai pondasi keberhasilan politik. Kemenangan PKB di Pesisir Selatan membuktikan bahwa pengelolaan *bonding*, *bridging*, dan *linking social capital* secara seimbang dapat memperkuat dukungan dan menciptakan hubungan politik yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan enam anggota legislatif PKB terpilih pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan modal sosial sebagai strategi utama, bukan sekadar faktor pendukung. Seluruh anggota legislatif memanfaatkan tiga bentuk modal sosial sebagaimana dikemukakan Woolcock, yaitu *bonding*, *bridging*, dan *linking social capital*. *Bonding social capital* tercermin dari hubungan emosional dan dukungan yang terbangun melalui keluarga, kerabat, tokoh adat, sahabat dekat, dan komunitas lokal. *Bridging social capital* terlihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial, organisasi keagamaan, dan jejaring lintas komunitas yang memperluas dukungan di luar basis inti. Sementara itu, *linking social capital* diwujudkan melalui hubungan dengan lembaga pemerintahan, tokoh politik, partai, serta jabatan strategis yang memberi akses pada kebijakan dan sumber daya.

Variasi latar belakang, seperti pengalaman sebagai wali nagari, pengusaha, atau tokoh masyarakat, memengaruhi bentuk modal sosial yang dominan. PKB secara strategis memilih calon dengan jaringan luas, kedekatan emosional, dan rekam jejak aktif di tengah masyarakat, sehingga *bonding* menjadi pondasi awal, *bridging* sebagai sarana ekspansi, dan *linking* untuk memperkuat legitimasi di tingkat pemerintahan. Bagi masyarakat, modal sosial diukur melalui



kehadiran nyata, kedekatan emosional, dan konsistensi interaksi di luar masa kampanye. Hubungan yang berkelanjutan dinilai lebih bermakna daripada janji politik sesaat. Keterlibatan anggota legislatif di komisi-komisi DPRD yang relevan dengan keahlian masing-masing juga memperkuat efektivitas program kerja. Secara keseluruhan, kombinasi *bonding*, *bridging*, dan *linking social capital* menjadi fondasi kokoh untuk mempertahankan dukungan, meningkatkan partisipasi politik, memperluas basis elektoral, dan menjaga legitimasi pasca-kemenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 107-206.
- Laura, N., Sari, D. R., Setiawan, I., & Herdiyanti. (2018). Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Alam Sebagai Strategi Bertahan Hidup di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. *Society*, 6(2).
- Munif, F. (2020). Pengembangan Madrasah Melalui Modal Sosial. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 84-98.
- Situmorang, N. Z. (2017). *Kaji Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis*.
- Suryawan, N. (2017). Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam integrasi antara etnik Bali dan etnik Bugis di desa Petang, Badung, Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 07, 17-32